

ABSTRAK

PEMANFAATAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI ABANGPOL DALAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT (STUDI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Auzellya Izma Salsabilla

Aplikasi Abangpol merupakan portal layanan yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung untuk memfasilitasi proses pelaporan organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan *e-Government* melalui aplikasi Abangpol dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori *e-Government* serta merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap organisasi kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-Government* melalui aplikasi abangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat yang di dasarkan pada indikator internal yaitu *information* (informasi) adalah proses yang dilakukan belum optimal dan tidak sesuai pada tujuan pembinaan, indikator *Two- way Communication* (komunikasi dua arah) belum maksimal, salah satu indikatornya adalah belum tersedianya ruang dialog atau fitur interaktif secara langsung di dalam aplikasi. Indikator *transaction* (transaksi) adalah alur pemberkasan pelaporan dilakukan belum optimal sehingga beberapa organisasi masyarakat yang masih belum mengerti tentang penggunaan aplikasi abangpol. Indikator *integration* (integrasi) adalah proses pembinaan yang belum optimal dikarenakan Sebagian organisasi masyarakat masih belum mengerti tentang pelaporan dengan menggunakan aplikasi abangpol. Kemudian, *political participation* (partisipasi politik) adalah belum menyediakan fitur partisipatif yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan untuk terlibat langsung dalam forum komunikasi digital.

Kata kunci : *E-Government*, Organisasi Masyarakat, Pembinaan, Kesbangpol.

ABSTRACT

UTILIZATION OF E-GOVERNMENT THROUGH THE ABANGPOL APPLICATION IN THE GUIDANCE OF COMMUNITY ORGANIZATIONS (A STUDY AT THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY)

By

Auzellya Izma Salsabilla

The Abangpol application is a service portal provided by the National and Political Unity Agency (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) of Bandar Lampung City to facilitate the reporting process for community organizations. This study aims to analyze the utilization of e-Government through the Abangpol application in the development of community organizations by employing a descriptive qualitative approach. The theoretical foundation used is the theory of e-Government, with reference to the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. The main focus of this research is to examine the forms of guidance provided by the National and Political Unity Agency to community organizations in Bandar Lampung City. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of e-Government through the Abangpol application in the development of community organizations, based on internal indicators, is not yet optimal. The information indicator shows that the process is not aligned with the intended objectives of organizational development. The two-way communication indicator has not been maximized, as evidenced by the absence of a direct dialogue space or interactive features within the application. The transaction indicator reveals that the document submission process is still suboptimal, causing several community organizations to lack understanding of how to use the Abangpol application. The integration indicator demonstrates that development efforts remain ineffective, as some organizations are still unfamiliar with the digital reporting system. Lastly, the political participation indicator reflects the lack of participatory features that would allow community organizations to actively engage in digital communication forums.

Keywords : E-Government, Community Organizations, Development, Kesbangpol.